

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL PADA BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Ni Nyoman Widiasih¹
Gayatri²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: widiasih.nyoman@gmail.com/ +6281239239474

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Belanja modal Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran akan menambah aset daerah. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap Pemerintah Daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama memberikan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pada belanja modal serta untuk mengetahui terjadinya fenomena *flypaper effect*. Penelitian dilakukan pada periode tahun 2010-2015. Populasinya adalah delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi. Data sekunder yaitu Laporan Realisasi APBD. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif pada belanja modal. Fenomena *flypaper effect* tidak terjadi pada belanja modal.

Kata Kunci : PAD, DAU, DBH, *Flypaper Effect*.

ABSTRACT

Capital expenditure of local government whose benefits exceed one fiscal year will add the local assets. The capital expenditures are used to acquire fixed assets such as the equipment local government, infrastructure and other fixed assets. Fixed assets owned by the local government as a result of capital expenditure is the main requirement in providing public services. The purposes of this study are to determine the influence of local revenues, general allocation funds, and revenue-sharing on capital expenditure as well as to determine the occurrence of the phenomenon of flypaper. The study was conducted in the period 2010-2015. Its population is eight regencies and one city in Bali province. The sampling method used was saturated sampling so that the sample in this study were all members of the population. The data used is secondary data APBD Realization Report. The analysis technique used is multiple linear regression. The test results show that the local revenue and general allocation fund positive effect on capital expenditure, while the revenue-sharing negative effect on capital spending. Flypaper phenomenon does not occur in capital expenditure.

Keywords: PAD, DAU, DBH, *flypaper effect*.

PENDAHULUAN

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada investasi swasta telah lama menjadi isu penting dalam perdebatan kebijakan fiskal (Wang, 2005). Anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (Nordiawan, 2007:19). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Defisit anggaran yang terus-menerus bisa dihindari jika para pembuat kebijakan memahami sifat hubungan antara pengeluaran dan pendapatan (Gounder *et al.*, 2007). Pemerintah daerah menghadapi keputusan penganggaran yang sulit ketika ekonomi lokal mengalami guncangan yang signifikan (Carr, 2011).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Stine (1994) yang menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Tujuan keseluruhan dari pemerintah dalam ekonomi berpusat pada tiga fungsi penting yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi (Fatai, 2015). Agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai,

disinilah diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi. Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Kuncoro, 2004).

Fenomena belanja modal tahun 2009 hingga 2013, dimana secara rata-rata mengalami peningkatan di kisaran 12,7 persen dari tahun 2009 hingga 2013. Namun bila dilihat secara nominal maka perubahan tersebut cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2009 total belanja modal mencapai Rp. 114,6 miliar rupiah lalu mengalami penurunan di tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 96,2 miliar rupiah. Peningkatan di tahun 2011 hingga tahun 2015 total belanja modal mencapai Rp. 175,6 miliar rupiah (Martini, 2015). Di dalam penelitiannya presentase rasio belanja modal seluruh provinsi masih dibawah 45 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dari sebagian besar provinsi di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, sebab proporsi belanja modal yang dianggarkan masih redah.

Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Perubahan anggaran belanja, terutama belanja modal (*capital expenditure*) dipandang penting karena berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik (Forrester, 1992). Meningkatkan belanja modal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melalui belanja modal pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Pembangunan

fasilitas akan memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai belanja daerahnya. Kejadian ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah mengatasi ketimpangan fiskal ini, dengan cara mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dikukuhkan dengan Undang – Undang (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Rebudgeting merupakan proses revisi yang dilakukan pemerintah dalam memperbaharui anggarannya selama tahun fiskal (Pessina, 2012). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengotimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002).

Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penyaringan aspirasi masyarakat (Halim dan Syukriy, 2006). Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang

diterima oleh daerah–daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri antara lain yang digunakan penulis sebagai variabel adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini dan fenomena yang diangkat pada penelitian ini, yaitu kurangnya perhatian dari sebagian besar provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, sebab proporsi belanja modal yang dianggarkan masih redah. Pada penelitian ini tidak mencantumkan dana alokasi khusus karena pemanfaatan dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah (Julitawati, 2012). Schwalle (1999) menegaskan perlunya untuk menilai penggunaan penerimaan pemerintah dengan berbagai output sosial (yang dapat dinikmati publik). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Wong (2004) menyatakan pembangunan infrastruktur industri memberikan dampak terhadap kenaikan PAD. Selain PAD, yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah otonom dan kota dalam bentuk hibah (Soejoto *et al.*, 2015). DAU merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranaan DAU terletak pada kemampuan untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Afrizawati (2012) menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Akibatnya muncul permasalahan ketergantungan pemerintah daerah kepada dana hibah dari pemerintah pusat memicu terjadinya fenomena *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah. *Flypaper effect* adalah suatu fenomena pada kondisi ketika Pemerintah Daerah

merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah (Bintoro, 2011). Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan. Rahmawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah” menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja modal untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Pemerintah Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja modal daerahnya juga semakin tinggi. Sari (2009) yang meneliti di Riau dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung“ memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung. PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung. Seperti yang sudah diketahui bahwa belanja langsung merupakan bagian dari belanja modal. Menurut penelitian Masdjojo dan

Sukartono (2009) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dengan Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008 menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah secara signifikan. Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami *flypaper effect* terbukti atau diterima, respon Belanja Daerah masih lebih besar disebabkan oleh dana perimbangan khususnya yang berasal dari komponen dana alokasi umum.

Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengembangan pada penelitian Rahmawati (2010). Perbedaan penelitian ini dengan riset-riset sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan periode penelitian tahun 2011-2015 karena dengan menggunakan data lima tahun terakhir dari penyusunan penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Dalam penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel bebas, serta mengkonfirmasi terjadinya fenomena *flypaper effect* pada Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan penelitian yang dilakukan Rahmawati (2010) meneliti pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) meneliti pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian Rahmawati (2010) dan

mengetahui apakah seluruh komponen dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi hasil berpengaruh pada belanja modal serta mengamati fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pada belanja modal.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis dan kegunaan teoritis bagi pihak terkait, yaitu untuk kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan bukti empiris, tambahan informasi dan wawasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pada belanja modal dan menambah daftar pustaka di lingkungan akademis. Kegunaan praktis untuk memberikan masukan-masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan belanja modal agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pihak pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam menjaga dan meningkatkan kinerjanya.

Federalisme menyangkut tentang semua distribusi kedaulatan. Dengan demikian, tidak ada federalisme tanpa *fiscal federalism* (Ouimet, 2014). Teori *Fiscal Federalism* merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana

hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Teori *Fiscal Federalism* memiliki dua perspektif teori, yaitu perspektif tradisional (*traditional theories*) dan perspektif baru (*new perspective theories*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah (Saragih, 2003).

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada proyek-proyek tertentu untuk meningkatkan kenyamanan warga untuk jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari satu tahun (Ayinde *et al.*, 2015). Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Belanja modal untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintah daerah mendapatkan

dana yang besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mendanai belanja modal dan pembangunan, serta bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dari APBN dalam mendanai kebutuhan daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan pemerintah antar-daerah (Simanjuntak, 2013).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil diberikan Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah *vertical fiscal balance* yaitu untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan fiskal dengan sumber-sumber fiskal pada berbagai tingkat pemerintah (Solihin, 2011).

Flypaper effect atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Karena itu *flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan Asli daerah merupakan sumber pendapatan penting untuk pemerintah dalam memenuhi belanja daerah dan menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas daerah serta program-program pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal (Maimunah, 2008; Mentayani, 2012; dan Darwanto dan Yustika Sari, 2007). Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Di bidang ekonomi dan keuangan, hubungan pendapatan dan pengeluaran secara luas dibahas sejak akhir 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut secara empiris telah diuji (Chang dan Ho, 2002). Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana transfer pemerintah ini menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh maka semakin tinggi Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa Dana Alokasi Umum merupakan bentuk transfer yang penting untuk pembangunan daerah namun menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Afrizawati (2012), Mawarni dkk. (2013), dan Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Modal. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan

alokasi belanja daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Darmayasa (2014), Surya dkk. (2015), dan Wandira, (2013) yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh pada Belanja Modal. Dengan Demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

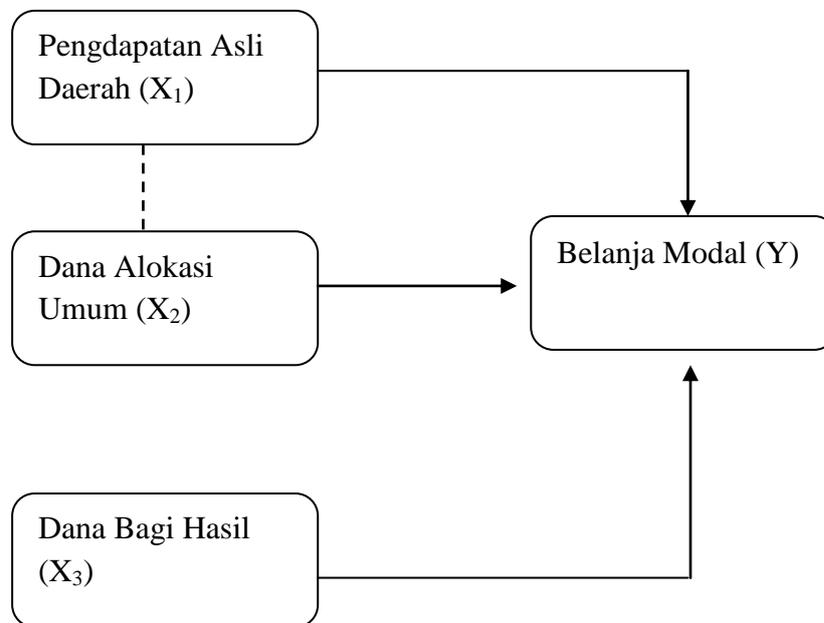
H₃: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Dana Alokasi Umum yaitu dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Berdasarkan konteks desentralisasi fiskal, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah (PAD) yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect* atau dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Modal lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Dengan kata lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat. Maryati (2010), Handayani (2009) dan Afrizawati (2012) menyatakan bahwa terdapat fenomena *flypaper effect* pada Belanja Modal di beberapa daerah di Indonesia. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₄ : Terdapat fenomena *flypaper effect* pada Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), dan Dana Bagi Hasil (X₃). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (Y). Desain penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Data Diolah 2016

Keterangan:

— = Pengaruh variabel independen pada variabel dependen

--- = Fenomena *flypaper effect*

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka dan dapat diukur satuannya. Adapun data kuantitatif yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD tahun

2010-2015 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang memuat pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan belanja modal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah metode sampling jenuh, yaitu dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan.

Teknik analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS. Adapun model persamaannya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Belanja Daerah
- α = Konstanta
- $\beta_{1,2,3 \dots i}$ = Koefisien Regresi masing-masing X_i
- X_1 = Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Dana Alokasi Umum
- X_3 = Dana Bagi Hasil
- e = *Residual Error*

Pengujian regresi dalam penelitian ini harus memenuhi syarat-syarat lolos dari uji asumsi klasik, pengujian asumsi klasik meliputi : pertama, Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal berarti data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Data tersebut

dikatakan berdistribusi normal bila $sig. > \alpha = 0,05$. Kedua, Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji *Durbin-Watson*, yaitu digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak. Nilai *Durbin-Watson* merupakan kriteria tidak terjadinya autokorelasi, dimana dilakukan perbandingan nilai *Durbin-Watson* dengan nilai pada tabel dengan menggunakan nilai signifikansi, jumlah sampel dan jumlah variabel independen. Ketiga, Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya nilai *variance inflation factor* (VIF). Tidak terjadi multikolinearitas adalah yang memiliki nilai $VIF < 10$ dan mempunyai angka *tolerance* $> 0,1$. Keempat, Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas digunakan metode *Glejser* yaitu dengan meregresi nilai *absolute residual* dari model yang diestimasi terhadap variabel independen.

Uji kesesuaian model dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian ini telah memenuhi uji kesesuaian model. Penelitian ini dapat dikatakan memenuhi uji kesesuaian model apabila nilai signifikansi regresi lebih kecil dari 5% ($sig < 0,05$). Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya. Nilai R^2

besarnya antara 0 dan 1. Jika $R^2 = 1$, berarti 100 persen total variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Namun jika $R^2 = 0$, maka tidak ada total variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang terdiri dari jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi (Ghozali, 2013:19). Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	54	16.253	2.722.626	391.894	624.671
DAU	54	131.920	868.512	484.686	158.913
DBH	54	14.233	186.560	43.287	39.353
Belanja Modal	54	30.023	989.406	183.098	206.787

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Pendapatan Asli Daerah rata-rata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2015 adalah sebesar 391.894.327.163 rupiah, minimum sebesar 1.625.951.099 rupiah, dan maksimum sebesar 27.226.255.621 rupiah. Dana Alokasi Umum rata-rata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2015 adalah sebesar 484.685.823.481 rupiah, minimum sebesar 131.919.568.000 rupiah, dan maksimum sebesar 186.560.094.466 rupiah. Dana Bagi Hasil rata-rata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2015 adalah sebesar

43.287.449.545 rupiah, minimum sebesar 14.233.392.933 rupiah, dan maksimum sebesar 186.560.094.466 rupiah. Belanja Modal rata-rata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2011-2015 adalah sebesar 183.098.380.583 rupiah, minimum sebesar 30.022.825.925 rupiah, dan maksimum sebesar 989.405.909.339 rupiah.

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan pengujian ketepatan model penelitian berupa uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residualnya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asump. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asump. Sig. (2-tailed)* model persamaan yang diuji sebesar 0,464 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan data dari model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 ataupun nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami gejala multikoleniaritas dalam penelitian ini.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,879, pada tabel *Durbin-Watson* dengan $n = 54$ dan $k = 3$ tingkat signifikansi 5% menunjukkan nilai $d_L = 1,446$ dan $d_U = 1,680$. Nilai DW

1,879 lebih besar dari batas atas d_u yakni 1,680 dan kurang dari $(4-d_u)$ $4-1,680 = 2,32$ maka pengujian dengan *Durbin Watson* (DW) berada pada daerah tidak terdapat autokorelasi sehingga model regresi yang digunakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Analisis linier berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja modal. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 42.932.844.031,240 + 0,355X_1 + 0,104X_2 - 1,140X_3 + e$$

Uji kelayakan model regresi berganda yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini telah dilakukan dan diperoleh hasil nilai *P-value* = 0,000 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan model regresi berganda penelitian ini telah memenuhi uji kelayakan model.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi dengan parameter R^2 sebesar 0,936 atau 93%. Hal ini berarti variabel

independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh pada Belanja Modal sebesar 93% sisanya 7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Tabel 2.
Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	42932844031	28873713680.		1.487	.143		
	.240	511					
PAD	.355	.013	1.073	26.606	.000	.745	1.342
DAU	.104	.049	.080	2.126	.038	.859	1.164
DBH	-1.140	.218	-.217	-5.226	.000	.703	1.422

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil uji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) pada Belanja Modal (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan pada Belanja Modal. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,355 menunjukkan adanya pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal. Hasil ini berarti H_1 diterima.

Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil uji pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) pada Belanja Modal (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,038 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan pada Belanja Modal. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (X_2) sebesar 0,104 menunjukkan adanya pengaruh positif Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. Hasil ini berarti H_2 diterima.

Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil uji pengaruh Dana Bagi Hasil (X_3) pada Belanja Modal (Y) diperoleh p -value sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan pada Belanja Modal. Nilai koefisien regresi Dana Bagi Hasil (X_3) sebesar -1,140 menunjukkan adanya pengaruh negatif Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal. Hasil ini berarti H_3 ditolak.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien Beta Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0,355 lebih besar dari pada koefisien Beta Dana Alokasi Umum yaitu 0,104. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada Belanja Modal. Hasil penelitian ini gagal mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil ini berarti H_4 ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, Dana alokasi umum berpengaruh positif pada belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, Dana bagi hasil berpengaruh negatif pada belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan Tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Saran dapat diberikan kepada pemerintah Provinsi Bali yang sudah mandiri dalam mendanai belanja modal dilihat dari pendapatan asli daerah di setiap kabupaten/kota, maka diharapkan untuk mempertahankan. Agar tidak

terjadi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Bali diharapkan agar mendorong Kabupaten/Kota kecuali Badung untuk menggali sumber pendapatan dalam daerah seperti industri pariwisata sehingga terjadi pemerataan dan pariwisata tidak terfokus pada kabupaten Badung saja. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang rentang waktu penelitian serta menggunakan variabel yang lebih bervariasi dan memperluas cakupan daerah sampel penelitian yang antara satu provinsi dengan provinsi lainnya untuk melihat apakah terjadinya *flypaper effect* di daerah lain.

REFEERENSI

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Bali). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 8 (1) : 1450 -1465.
- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 2(1), pp:21-30.
- Ayinde, Kayode, John Kuranga, & Adewale F. Lukman. 2015. Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-integration, Error Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*. Vol 5(6). pp: 858-867
- Aqnisa, Reuty Fajar. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Biro Keuangan Provinsi Bali.
- Bintoro, Dadang Adi. 2011. Fenomena Flypaper Effect. <http://dabintoro.blogspot.com/2011/11/flypaper-effect.html>. (29 November 2016)

- Bratakusuma, Deddy Supriady dan Solihin Dadanf. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Carr, Douglas A. 2011. *Responses To Local Fiscal Shocks: Path Dependency Effects Of The Clean Air Act*. Oakland University. Vol 11 (2). pp: 160-179.
- Chang, Tsangyao & Yuan Hong Ho. 2002. Tax or spend, what cause what: Taiwan's experience. *International Journal of Business and economics* 1 (2):157-165
- Darmayasa, I.N. 2014. *Faktor-Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi Bali*. Politeknik Negeri Bali.
- Darwanto dan Yulia Yustika Sari (2007). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
- Dedy Haryadi dan Entin Sriani Muslim. 2002. Laporan Pra-Penelitian Tentang Anggaran Peka Gender (Studi Kasus Kota Bandung). Bandung: *Jurnal Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)*.
- Doi, Takero. 1998. Is Japanesse Local Finance Really Centralized? From Viewpoint of The Revenue-Expenditure Nexus. *University of Tokyo, Working Paper*.
- Fatai, Ogunlana Olarewaju. 2015. *Government Expenditure Efficacy and The Question Of Growth: Evidence From Nigeria*. European Scientific Journal. Vol 11 (28). pp: 423-434.
- Forrester, Jhon P. & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review*. Vol 52. No.5: 467-473.
- Gounder, Neelesh, Paresh Kumar Narayan, & Arti Prasad. 2007. *An Empirical Investigation Of The Relationship Between Government Revenue and Expenditure - The case of the Fiji Islands*. International Journal of Social Economics. Vol. 34 (3). pp: 147-158
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.

- Gibson, Charles H., 1990. *Financial Statement Analysis, Using Financial Accounting Informasion*. Fourth Edition. *Pws-Kent Publishing Company*. Boston.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah; Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2 (1) :53-64
- Handayani, Kristina. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi. Skripsi Program sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Harianto, David dan Adi, Priyo Hadi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah , dan Pendapatan Per-Kapita*. SNA X Unhass Makasar 26-28 Juli 2007.
- Hayek, Friedrich. 1945. The Use of Knowledge in Society. “*American Economic Review*”.
- Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S & Schuyley Tilly, 1994. Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests. *Journal of Urban Economics*. 35: 159 – 174.
- Indhi, Hastuti. 2011. Analisis *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro*.
- Julitawati, Ebit, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), pp: 1-15.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Khusaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Universitas Brawijaya.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Millas. 2001. *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working Paper.

- Maimunah, Mutiara. 2008. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11 (1) : 37-51.
- Martini, Kadek dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10.2 (2015):426-443.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* . Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mentayani, Nuruh Hayati dan Rusmanto. 2012. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread* 2(1) pp: 55-64.
- Masdjojo dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2006-2008. *TEMA (Telaah Manajemen)*, 6(1), pp: 32 -50.
- Mawarni, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2(2). pp: 80-90.
- Maryati. 2010. Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten di Provinsi DIY). Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Musgrave, DA, dan PB Musgrave. 1973. *Publik Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Kogakusha, Ltd. Tokyo.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat : Jakarta.
- Ouimet, Hubert Rioux. 2014. Quebec and Canadian Fiscal Federalism: From Tremblay to Séguin and Beyond. *Canadian Journal of Political Science*. Vol. 47 (1). pp: 47-69.
- Pambudi, Tri Widodo. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Pessina, Eugenio Anessi, Mariafrancesca Sicilia & Ileana Steccolini. 2012. *Budgeting and Rebudgeting in Local Government*. Public Administration Review. Vol 72. Iss.6 PP. 875-884.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Putra, Ida Bagus Dwi dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. ISSN: 2303-1018. Vol.13.3 Desember 2015: 811-827.
- Putro, Nugroho Suratmo. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Satuan Akuntansi Pemerintahan.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Belanja Daerah, Departemen Dalam Negeri.
- Sari, Noni Puspita dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Schwalle, Daniel P. 1999. *The Impact of Intergovernmental Grants on The Aggregate Public Sector*. Southern Economic Journal. Hal : 57 – 58.
- Solihin, Ismail. 2011. Pengantar Manajemen. Bandung: Erlangga.
- Soejoto, Ady, Waspodo Tjipto Subroto, & Suyanto. 2015. *Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development*. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 5(3), Hal:763-771.

- Simanjuntak, Lestari L F., Ahmad Subeki, Ika Sasti Ferina, & Hasni Yusrianty. 2013. *Analysis Of Flypaper Effect In General Allocation Fund And Regional Original Income To Regional Expenditure Of Districts And Cities In South Sumatera*. The 14th FourA Annual Conference, Penang, Malaysia. pp: 1-29.
- Stine, William F. 1994. *Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Government in an Era Of Retrenchment*. National Tax Journal 47(4). pp:799-816.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Adi, Darwanis, & Syukriy Abdullah. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 4(3). pp: 1-14.
- Utama, Suyana. 2014. "Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif". Denpasar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Vigneault, Marianne. 2010. *Fiscal Decentralization With Regional Redistribution and Risk Sharing*. Department of Economics Bishop's University 2600 College Street, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1M 1Z7. Vol. 10 (3), pp. 48-79.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 1 (3) : 45-51.
- Wang, Baotai. 2005. Effects of government expenditure on private investment: Canadian empirical evidence. *Economics Program, University of Northern British Columbia*. Vol 30. pp: 493-504.
- Wong, Jhon D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Fall 1s6.3 : 413-423